

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyadari pentingnya perekonomian dalam rangka mencapai tujuan nasional, pemerintah berupaya untuk membuat kondisi perekonomian Indonesia membaik. Fokus kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan perbaikan ekonomi makro. Salah satu aspek ekonomi makro adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara.¹

Kegiatan perekonomian negara meliputi pengeluaran dan penerimaan negara. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak memiliki peran penting karena di negara berkembang seperti Indonesia pajak sangat dibutuhkan sebagai kontribusi perekonomian. Selain itu kondisi ekonomi global yang juga akan berpengaruh mendorong usaha pemerintah untuk memanfaatkan posisi negara yang strategis untuk menggalakkan sektor perdagangan, terutama perdagangan luar negeri atau lebih dikenal ekspor dan impor.

Kondisi perekonomian yang dihadapi saat ini mendorong pemerintah mengambil langkah mengeluarkan kebijakan, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal di dalamnya meliputi tindakan menentukan

¹Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (mikroekonomi & makroekonomi)* (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), hal.11-15. Beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi makro antara lain: 1)Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara 2)Pengeluaran agregat 3)Mengatasi pengangguran dan inflasi. Demikianlah pokok pikiran ekonom Inggris John Maynard Keynes, setelah tahun 1933 dilakukan penyempurnaan metode analisis ilmu ekonomi menggunakan metode induktif dengan fokus kepada ekonomi makro.

kebijakan perpajakan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan. Selama waktu belakangan ini pajak sebagai instrumen kebijakan diandalkan untuk mengatasi masalah maupun menjaga stabilitas perekonomian. Terlebih lagi masalah-masalah global seperti naiknya harga minyak dunia dan komoditas pangan serta dampak resesi ekonomi Amerika Serikat dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia saat ini. Sektor yang mendapat imbas dari masalah perdagangan internasional salah satunya adalah industri.

Sasaran ekonomi makro, yang merupakan bagian dari perekonomian negara, salah satunya adalah memajukan sektor industri dalam negeri, yang merupakan bagian kegiatan pembangunan sebagai langkah nyata yang berkesinambungan dari pemerintah. Alasannya adalah karena industri dalam negeri mempunyai peran yang penting dalam perekonomian negara.

Tidak dapat disangkal bahwa sumber utama kegiatan ekonomi adalah pembangunan industri. Menjelang akhir Maret 2007 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan Visi Indonesia 2030, yang disusun Yayasan Indonesia Forum. Menurut visi tersebut pada tahun 2030 nanti Indonesia akan menjadi sebuah negara industri maju dan masuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia seperti misalnya Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman sekarang ini. Industri tidak hanya penting karena kemampuannya menghasilkan nilai tambah paling besar di antara sektor-sektor ekonomi, tetapi juga merupakan sumber utama peralihan dan perkembangan teknologi dan pengetahuan.²

²Tulus Tambunan, *Perkembangan Industri Nasional Sejak Orde Baru Hingga Pascakrisis*, (Jakarta:Penerbit Universitas Trisakti, 2008), hal.vi-xii

Pertumbuhan sektor industri dalam negeri dipengaruhi dukungan dari pemerintah karena pemerintah yang mempunyai otoritas mengeluarkan kebijakan. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri, Teknologi, dan Kelautan Rachmat Gobel juga mengatakan pertumbuhan jumlah penduduk seharusnya seiring dengan perkembangan industri. Artinya, industri dalam negeri dapat dikembangkan sehingga lebih banyak produk yang bisa diperoleh dari dalam negeri, daripada impor.³

Sampai saat ini terdapat masalah-masalah yang menghambat industri dalam negeri untuk dapat berkembang. Selain masalah ekonomi global seperti dampak kenaikan harga minyak dunia, Menteri Perindustrian Fahmi Idris juga menyebutkan beberapa masalah utama yang dihadapi industri dalam negeri saat ini antara lain:

- Masih tingginya impor bahan baku, barang setengah jadi, dan komponen.
- Struktur industri yang lemah akibat masih terbatasnya jenis dan ragam industri serta keterkaitan antar industri dan antar bagian di dalam industri.
- Ragam dan jenis produk ekspor industri, termasuk tujuan eksportnya, juga masih terbatas.
- Keterbatasan penguasaan teknologi, khususnya *engineering* dan desain.
- Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah (IKM).
- Masih terpusatnya industri di Pulau Jawa.
- Masalah lain yang merupakan isu nasional seperti: kepastian hukum, perburuhan, tingginya bunga bank, dan penyelundupan.⁴

Permasalahan tersebut merupakan hambatan Departemen Perindustrian (Depperind) mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009.⁵

³Agung Kurniawan dan Yunice Aprily, *Industri Kurang Dukungan*, Harian Seputar Indonesia tanggal 30 Januari 2008, hal.20

⁴Muhammad Ma'ruf, *Insentif Industri Diperbaiki*, Harian Seputar Indonesia tanggal 24 Januari 2008, hal.14

⁵*ibid.*

Tabel I.1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009

Pertumbuhan industri	8,6 % per tahun
Utilitas kapasitas produksi nasional	80%
Penyerapan tenaga kerja	500.000 orang per tahun
Investasi di industri	minimal Rp.50 triliun per tahun

Sumber : Harian Seputar Indonesia tanggal 24 Januari 2008 hal.14

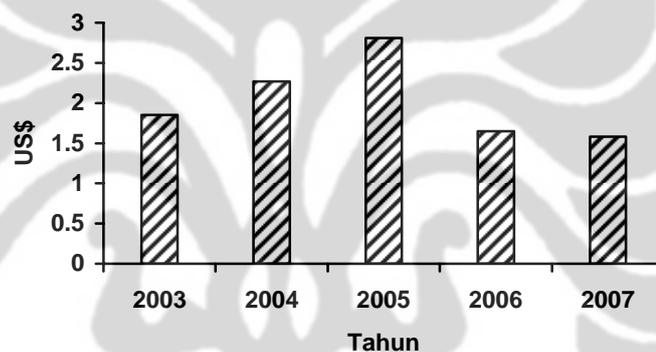
Masalah-masalah yang dihadapi industri tersebut juga melanda salah satu industri pionir, yaitu industri komponen otomotif nasional. Menurut Direktur Industri Alat Transportasi dan Kedirgantaraan Depperind, Syarif Hidayat, selama ini industri komponen otomotif di dalam negeri memang sudah cukup banyak dan tersebar luas, tetapi hanya untuk menutupi sebagian kecil kebutuhan, sedangkan tingkat teknologi yang digunakan masih tergolong rendah (*lowtech*). Selain itu bahan baku komponen yang di antaranya berbasis baja, logam, dan aluminium yang digunakan untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor masih bergantung pada impor karena belum mampu diproduksi di dalam negeri.⁶

Beberapa komponen kendaraan yang sudah bisa diproduksi industri domestik antara lain *dies jig and stamping, frame/chasis, axle, shock absorber*, sistem rem, *air conditioner* (AC), kompresor, sabuk pengaman, radiator, komponen mesin, speedometer, komponen elektrik, baterai, *steering system*, hingga interior tempat duduk. Akan tetapi kendala terbesarnya karena sebagian besar bahan baku untuk memproduksinya berasal dari impor. Kendala bahan baku menyebabkan

⁶BM bahan baku 0% agar dilanjutkan: Industri komponen mobil dapat insentif, Sumber: Bisnis Indonesia, 8 Februari 2008, www.dannydarussalam.com diunduh pada tanggal 11 Februari 2008

keterbatasan industri dalam negeri memenuhi permintaan atau kebutuhan komponen kendaraan mengakibatkan impor yang tinggi terhadapnya.

Industri komponen otomotif perlu mendapat perhatian pemerintah agar masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh industri tersebut dapat diatasi sebagai langkah perbaikan dan menjaga stabilitas ekonomi. Alasan lain yang mendukung yaitu kebutuhan komponen kendaraan meningkat seiring semakin meningkatnya permintaan kendaraan bermotor di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.



Grafik I.1
Impor Komponen Otomotif, tahun 2003-2007
(dalam miliar US\$)

Sumber : Hasil Laporan Pusat Data dan Informasi Departemen Perindustrian

Berdasarkan data Depperind, sejak 2003 impor komponen otomotif meningkat cukup signifikan. Pada 2003, impor komponen tercatat US\$1,85 miliar dan menembus US\$2,27 miliar pada tahun berikutnya. Impor komponen otomotif sempat mencapai rekor tertinggi pada 2005 yakni US\$2,81 miliar, mengikuti angka penjualan otomotif yang mencatat angka tertinggi sepanjang sejarah

sebanyak 533.840 unit.⁷ Data tersebut menunjukkan bahwa industri komponen otomotif dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan komponen otomotif akibat meningkatnya permintaan kendaraan bermotor, sehingga membuat produsen kendaraan bermotor memilih untuk melakukan impor. Hal ini sebagai refleksi rendahnya daya saing produk dalam negeri terhadap produk impor.

Perbaikan sektor perindustrian menjadi pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan pemberian insentif yang ditujukan kepada industri komponen otomotif. Syarif Hidayat meyakinkan dengan mengatakan: “Pemerintah akan berupaya optimal mendorong masuknya investasi baru di sektor komponen berteknologi tinggi (*hitech*)”.⁸ Investasi di sektor komponen berteknologi tinggi sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan industri otomotif di dalam negeri terhadap impor komponen. Salah satu yang sedang diupayakan adalah dengan mengusulkan industri komponen otomotif masuk ke dalam Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.1 tahun 2007. PP No.1 tahun 2007 ini mengatur tentang pemberian fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk investasi baru dan perluasan usaha dari industri tertentu di daerah tertentu yang berlaku hingga satu tahun ke depan. Sejumlah pertimbangan antara lain apakah industri yang diusulkan merupakan sektor pionir, mampu menyerap tenaga kerja dan mampu menyerap investasi dalam jumlah besar. Setiap investasi yang masuk ke sektor itu akan mendapatkan fasilitas pengurangan PPh 30% selama 6 tahun.

Selain berupaya agar industri komponen otomotif mendapat insentif PPh seperti dalam PP No.1 tahun 2007 dalam rangka investasi baru dan perluasan

⁷ *ibid.*

⁸ *ibid.*

usaha, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan agar industri komponen otomotif dapat memenuhi kebutuhan serta mempertahankan daya saing produknya di pasar global dan domestik. Daya saing yang berusaha ditingkatkan adalah melalui keunggulan biaya produksi yang efisien, termasuk biaya bahan baku. Kebijakan ini dikaji tim perekonomian seperti Depperind bersama tim tarif Departemen Keuangan (Depkeu) diharapkan dapat mendorong pengembangan dan pertumbuhan industri komponen kendaraan bermotor dalam negeri.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu pemberian fasilitas kepabeanan berupa pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor. Sebelumnya impor bahan baku tersebut dikenakan Bea Masuk dengan tarif bervariasi antara 5% sampai 15%. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.011/2007 tentang pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor, tanggal 3 April 2007, dan berlaku dalam jangka waktu satu tahun.

Pihak terkait seperti Depperind dan kalangan pengusaha komponen otomotif menilai jangka waktu satu tahun terlalu singkat untuk memanfaatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk. Dengan demikian Pemerintah, dalam hal ini tim perekonomian pemerintah, sedang membahas langkah kebijakan selanjutnya dengan mempertimbangkan implementasi dan keberhasilan pemanfaatan fasilitas pembebasan Bea Masuk ini.

B. Permasalahan

Dalam pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan, kondisi perekonomian merupakan hal yang krusial karena menentukan kinerja pemerintah dan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Masalah yang dapat mengganggu kondisi ekonomi menjadi perhatian pemerintah bersama tim ekonominya. Hal tersebut mendorong pemerintah lebih fokus kepada ekonomi makro dengan memperhatikan sektor industri dalam negeri.

Pertumbuhan industri merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang seperti Indonesia sebagai strategi untuk mempertahankan dan memajukan laju ekonomi. Industri komponen otomotif, yang merupakan bagian industri nasional yang tergolong industri pionir, membutuhkan kebijakan yang signifikan dari pemerintah untuk mempertahankan daya saing di pasar global dan domestik.

Dalam proses pengembangan dan upaya mendorong pertumbuhan industri terdapat faktor kendala yang menjadi masalah penghambat. Masalah-masalah penghambat yang dihadapi oleh industri dalam negeri, dalam hal ini industri komponen otomotif, perlu diatasi agar tidak terjadi stagnasi dalam perekonomian. Masalah utamanya adalah penyerapan bahan baku yang sebagian besar berasal dari impor karena bahan baku tersebut tidak dapat diperoleh dari dalam negeri. Selain itu seiring permintaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat mengakibatkan tingginya impor komponen kendaraan bermotor karena kebutuhan akan komponen kendaraan bermotor yang tidak dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan mendalam pemerintah mengambil langkah karena menilai diperlukan kebijakan, seperti pemberian insentif, yang ditujukan kepada industri komponen otomotif. Artinya pemerintah berharap dengan memberikan insentif akan membawa hasil yang lebih besar dan membawa perbaikan. Insentif tersebut menggunakan instrumen Bea Masuk sebagai stimulus melalui pemberian fasilitas kepabeanan berupa kebijakan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor. Kebijakan ini dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.011/2007 tanggal 3 April 2007 dan berlaku dalam jangka waktu tertentu selama satu tahun.

Pemberian fasilitas pembebasan Bea Masuk ini disambut baik oleh pengusaha otomotif, khususnya pengusaha komponen otomotif, selaku penikmat kebijakan tersebut yang memperjuangkannya sejak lama. Depperind pun menilai insentif untuk industri komponen otomotif akan berperan memajukan sektor industri dalam negeri. Selanjutnya pihak-pihak terkait seperti para pengusaha otomotif dan Depperind, telah bereaksi dengan mengusulkan agar pemerintah memperpanjang kebijakan pembebasan Bea Masuk tersebut.

Usulan agar kebijakan pembebasan Bea Masuk ini diperpanjang sesuai dengan tujuan awal dikeluarkannya PMK tersebut yaitu untuk menjaga daya saing produk komponen kendaraan bermotor hasil industri nasional, baik di pasar domestik maupun global. Selain itu alasannya adalah karena industri komponen otomotif masih memerlukannya untuk menjalankan kegiatan usahanya. Usulan tersebut telah dibahas dalam rapat Tim Tarif beberapa waktu lalu sebelum PMK No.34/PMK.011/2007 berakhir masa berlakunya.

Pemerintah tentu saja tidak serta merta mengabulkan usulan tersebut tapi juga melalui pertimbangan yang matang. Oleh karena itu perlu adanya pemantauan bagaimana implementasinya dan apakah mencapai tujuan dan sarannya. Pada dasarnya kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan industri, bukan sebaliknya.

Selain implementasinya, perlu dikaji juga apakah fasilitas pembebasan Bea Masuk tersebut memang tepat diterapkan atau hanya sebagai gambaran yang menunjukkan bahwa industri dalam negeri belum efisien. Kemudian, perlu tindak lanjut dari pemerintah, baik fasilitas tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuan ataupun tidak. Oleh karena itu, perlu tinjauan terhadap kebijakan yang telah diterapkan pemerintah melalui PMK No.34/PMK.011/2007 mengenai fasilitas pembebasan Bea Masuk.

Adapun pokok permasalahan yang diuraikan dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi perumusan kebijakan fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor?
2. Bagaimana berbagai faktor dapat menjadi penunjang maupun penghambat implementasi fasilitas pembebasan Bea Masuk tersebut?
3. Bagaimana fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku yang merupakan insentif untuk industri komponen otomotif dapat mencapai sasaran dan tujuannya?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

C.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan hal-hal yang melatarbelakangi perumusan kebijakan fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor.
2. Menggambarkan faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambat dalam penerapan fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor.
3. Menggambarkan pencapaian sasaran dan tujuan pemberian insentif berupa fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku yang ditujukan kepada industri komponen kendaraan bermotor.

C.2. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademis

Untuk memberikan dan menambah sumbangan informasi atau pemahaman ilmiah mengenai fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor, yang merupakan suatu tinjauan terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Selain itu agar dapat memberikan sumbangan terhadap penelitian selanjutnya.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk mengambil langkah tindak lanjut kebijakannya mengenai fasilitas pembebasan

Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor. Selain itu agar dapat berguna juga untuk perkembangan dan kemajuan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam lingkup industri komponen otomotif nasional, untuk selanjutnya menjadi sinergi dengan penguatan industri otomotif nasional.

D. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, penulis akan menggambarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian untuk menggambarkan tentang pembebasan bea masuk untuk bahan baku komponen kendaraan bermotor, tujuan dan signifikansi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini terbagi menjadi tiga sub-bab, yaitu Tinjauan Pustaka yang merupakan ulasan dan perbandingan dengan penelitian yang telah lebih dulu ada, Kerangka pemikiran yang merupakan konsep-konsep maupun teori-teori sebagai panduan dalam menganalisa pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor. Sub-bab yang terakhir adalah metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, hipotesis kerja, teknik pengumpulan data, dan pembatasan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU YANG DITUJUKAN KEPADA INDUSTRI KOMPONEN OTOMOTIF

Pada bab III, penulis akan menggambarkan dan menganalisis kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada industri komponen otomotif dengan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor.

BAB IV ANALISIS FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR (TINJAUAN TERHADAP PMK No.34/PMK.011/2007)

Pada Bab IV, penulis akan menganalisis untuk memberikan gambaran latar belakang, faktor penunjang dan penghambat, serta menganalisis pencapaian sasaran dan tujuan dikeluarkannya kebijakan pembebasan Bea Masuk atas impor bahan baku untuk pembuatan komponen kendaraan bermotor.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu simpulan yang merupakan rangkuman dari analisis bab-bab sebelumnya, dan saran yang ditujukan sebagai pemecahan masalah dari hasil penelitian yang dilakukan.